Analisa Kebijakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Dalam Penyerapan Anggaran Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19

¹Alwi, ²Muji Gunarto

¹STIE Abdi Nusa Palembang, Indonesia

²Universitas Bina Darma, Indonesia

* Corresponding author e-mail: alwi.palembang@gmail.com

Abstrak

The Covid-19 pandemic that hit Indonesia and the world has changed the order and policies in budget management. This study aims to find out the procedures carried out by the Region II Higher Education Service Institutions in the absorption of the 2020 Fiscal Year budget. This is because there is a big challenge, namely the Covid-19 Pandemic that is currently happening, not only in Indonesia but also throughout the world. This research was conducted with a qualitative descriptive approach, where the data collection method was conducted by interview. The key informants of this research are decision-making officials who are very influential on the absorption of the budget for the 2020 fiscal year. The results show that LLDIKTI Region II has made maximum efforts so that the absorption of the budget can be better or at least the same as in 2019 through budget adjustments, budget revisions in handling Covid 19, changes in the pattern of training or socialization activities, budget revisions to the rehabilitation of buildings and structures.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Serapan Anggaran, Pandemi Covid-19

1. Pendahuluan

Masa kepemimpinan ke-2 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengalami restrukturisasi di lingkungan kementerian dan lembaga, sehingga berakibat adanya lembaga yang berpindah dari satu kementerian ke kementerian yang lain. Hal ini dialami juga oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II dimana sebelumnya di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi namun sekarang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan tersebut didasarkan pada Perpres Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II berdasarkan Permendikbud Nomor 34 tahun 2020 sesuai pasal 1, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Kepala. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II meliputi empat propinsi yaitu Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung dengan tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Untuk melaksanakan operasional dan upaya penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II diberikan anggaran setiap tahunnya melalui

DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bendahara Umum Negara, Kementerian Keuangan. Penyerapan anggaran tersebut menjadi prestasi atau kinerja tersendiri bagi setiap satuan kerja dalam melaksanakan operasional layanan perkantoran untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan melalui Rencana Strategis (RENSTRA). Adapun penyerapan anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDKTI) Wilayah II menunjukkan angka yang stabil di atas 95% setiap tahunnya. Berikut ditampilkan tampilan serapan anggaran 2017-2019 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II.

Gambar 1. Grafik Penyerapan Anggaran LLDIKTI Wilayah II Tahun 2017 s.d 2020
(Sumber: LAKIN 2017 - 2020)

Tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri bagi LLDIKTI Wilayah II dalam penyerapan anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid 19 yang mengharuskan dihentikannya semua kegiatan yang sifatnya sosialisasi atau workshop. Padahal kegiatan yang bersifat sosialisasi atau workshop tersebut adalah salah satu cara yang digunakan oleh LLDIKTI Wilayah II dalam melaksanakan visi dan misi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan berpengaruh dalam penyerapan anggaran.

2. Kajian Literatur

2.1 Anggaran

Menurut para pakar di bidang pengelolaan anggaran, memberikan persetujuan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan pemerintah dalam jangka waktu tertentu, baik per triwulan, semester maupun tahunan, yang memuat keuangan untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang atau pengeluaran, dan penerimaan negara yang diperkirakan dapat membiayai pengeluaran tersebut dalam periode yang sama.

Ada empat fungsi anggaran (Didit, 2011), antara lain :

a. Fungsi Perencanaan

Yaitu merencanakan program yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang, dan cara pelaksanaan serta hasil yang diharapkan. Dengan harapan agar program-program

tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan bersama.

b. Fungsi Koordinasi

Yaitu sebagai alat mengatur berbagai program dari seluruh sub bagian yang sesuai untuk pencapaian tujuan.

c. Fungsi Pengawasan

Pengawasan sebagai tindak lanjut koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan realisasi anggaran.

d. Anggaran sebagai pedoman kerja

Anggaran suatu acuan secara sistematis dan dinyatakan dalam mata uang.

2.2 Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL)

Berdasarkan Permenkeu Nomor 104/PMK02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

RKA-K/L merupakan dokumen disusun oleh satuan kerja (satker) yang sebelumnya diberikan pagu anggaran oleh Eselon 1 Kementerian, yang sebelumnya sudah membagi pagu sesuai ajuan dan kebutuhan satker dan disetujui oleh Kementerian Keuangan. Setelah proses penyusunan, telaah dan disetujui oleh Eselon 1 dan Inspektorat Jenderal, maka diterbitkan DIPA sebagai acuan pelaksanaan kegiatan satker selama satu tahun.

2.3 Datar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).

DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang

lebih luas. Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: Pejabat Eselon II dan III yang ada di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, serta Tim Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan perincian sebagai berikut: Data primer berupa wawancara dengan Pejabat Eselon II dan III maupun tim Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. Data sekunder berupa surat edaran dan peraturan dari Kemenkeu, serta surat pemberitahuan dari Dirjen Dikti selaku Eselon 1.

4. Hasil dan Pembahasan

Penyerapan anggaran tahun 2020 merupakan tantangan yang besar bagi satuan kerja pemerintah di bawah kementerian dan lembaga. Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyak kegiatan sosialisasi atau workshop yang selama ini penyelenggaraannya di hotel tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu, perlu banyak kebijakan yang tepat agar penyerapan anggaran tetap sasaran dan sesuai target yang ingin dicapai. Minimal serapan anggaran tidak lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan dalam penyerapan anggaran tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. **Penyesuaian Anggaran PTN dan LLDIKTI.**

Penyesuaian Anggaran PTN dan LLDIKTI TA 2020 didasarkan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan RAPBN Tahun Anggaran 2020, serta surat Menkeu Nomor S-302/MK.02/2020 perihal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2020 dan surat Sesjen Kemendikbud No. 41021/A.A1/PR/2020 perihal Penghematan Alokasi Anggaran Kemendikbud Tahun Anggaran 2020, maka LLDIKTI Wilayah II telah melakukan penyesuaian anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 dari anggaran tersedia. Hal ini dengan melakukan pengurangan atau pemangkasan anggaran yang berasal dari perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium dan belanja non operasional, serta belanja barang lainnya yang terhambat akibat pandemik Covid-19 dan Belanja Modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas. Dengan pemangkasan anggaran ini, LLDIKTI Wilayah II telah mengurangi pagu anggaran sesuai dengan alokasi yang ditetapkan alokasi dari Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

b. **Revisi Anggaran terkait Penanganan Covid 19.**

Revisi Anggaran terkait Penanganan Covid 19 didasarkan pada surat Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu Nomor S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19, maka LLDIKTI Wilayah II telah melaksanakan

revisi anggaran dari pagu anggaran yang bukan prioritas. Adapun revisi yang dapat dilakukan pada akun seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Revisi Anggaran dari Pagu Anggaran yang bukan prioritas

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Penjelasan Akun	Contoh Penggunaan Akun
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19	Pengadaan Masker/ Hand Sanitizer Pengadaan Thermogun Pengadaan Bilik Desinfektan Lisensi Aplikasi Video Conference.
2	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	Digunakan untuk mencatat Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19.	Pembayaran biaya penyemprotan Desinfektan dan pelaksanaan Rapid Test Covid-19.
3	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19.	Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19.	Pengadaan/ pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen.

c. Revisi Anggaran terkait Kegiatan Pelatihan selama Pandemi Covid-19

Revisi anggaran terkait kegiatan pelatihan selama Pandemi Covid-19 dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah II. Hal ini disebabkan banyak kegiatan sosialisasi atau workshop untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Untuk menghindari agar anggaran tidak terserap, maka yang dilakukan adalah merevisi kegiatan bersifat teleconference melalui webinar, sehingga bisa terserap. Meskipun anggaran yang terpakai hanya Belanja Honorarium Narasumber dan Belanja Honorarium Panitia.

d. Revisi Anggaran terkait Rehabilitasi Perkantoran

Revisi anggaran terkait Rehabilitasi Perkantoran dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah II untuk melaksanakan perencanaan terbaru karena tidak termasuk pada DIPA sebelumnya. LLDIKTI Wilayah II melakukan Rehabilitasi Pembuatan Riging pada halaman kantor atau perbaikan saluran air dan lain-lain.

5. Kesimpulan dan Saran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu parameter dari kinerja satuan kerja. Dari uraian di atas, kebijakan yang dilakukan LLDIKTI Wilayah II telah berupaya semaksimal mungkin agar penyerapan anggaran tahun 2020 lebih baik atau setidaknya menyamai dengan tahun 2019. Mengingat tantangan terbesar adalah masa Pandemi Covid 19 yang belum diketahui kapan berakhirnya. Kebijakan yang diambil oleh LLDIKTI Wilayah II telah sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19.

Referensi

- Didit, H., 2011. *Teknik Penyusunan Anggaran Operasional Perusahaan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Permendikbud, Nomor 34 tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- PMK Nomor 104/PMK02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
- Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 perihal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2020.
- Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nommor 41021/A.A1/PR/2020 perihal Penghematan Alokasi Anggaran Kemendikbud Tahun Anggaran 2020.
- Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)